



Pandangan Politik Sarekat Hijau Indonesia terhadap Pemilu 2009¹

Pemilu 2009, Mengukuhkan Jalan Rente Ekonomi dan Kekuasaan Politik Modal

Pergerakan Pemilu di Indonesia

Pemilu 1999, merupakan pemilu umum langsung yang pertama dilaksanakan di Indonesia. Pemilu yang sebelumnya diprediksikan akan berlangsung ricuh, sesungguhnya merupakan proses politik yang diharapkan dapat merubah kondisi Indonesia yang selama satu dasawarsa dibawah rezim otoriter. Harapan yang begitu besar tentu saja dimiliki sebagian besar rakyat Indonesia yang menghendaki perubahan, dan pemilu langsung merupakan salah satu jalan menuju kesana dalam konteks pembangunan demokrasi yang dilakukan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Euforia terhadap pemilu 1999 ini dapat diukur dari banyaknya partai politik yang bertarung untuk memperebutkan kekuasaan, sebanyak 48 partai politik maju ke kancah pertarungan pemilu 1999. Jumlah partai politik yang mengikuti pemilu ini merupakan jumlah yang terbanyak setelah pemilu 1955 yang diikuti lebih dari 30 partai politik dengan kondisi politik Indonesia yang juga memanas. Pemilu 1999, menjadi momentum bagi partai-partai politik yang diberangus pada tahun 1977 oleh Pemerintah Orde Baru, untuk kembali ke kancah politik praktis. Demikian juga dinamika politik aliran yang kembali menguat pada pemilu 1999 ini, antara aliran politik nasionalis dan aliran politik islam.

Dibawah bayang-bayang kekhawatiran akan terjadi kerusuhan massa ditengah situasi politik yang memanas, pemilu 1999 akhirnya bisa terselenggara dengan baik. Sebagai sebuah proses demokrasi yang baru, pemilu 1999 telah melahirkan berbagai pelajaran

¹ Pandangan politik terhadap pemilu 2009 ini disiapkan oleh Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia

penting. Sebagai pemenangnya adalah PDI-P yang meraih 35.689.073 suara atau 33,74 persen dengan perolehan 153 kursi. Golkar memperoleh 23.741.758 suara atau 22,44 persen sehingga mendapatkan 120 kursi atau kehilangan 205 kursi dibanding Pemilu 1997. PKB dengan 13.336.982 suara atau 12,61 persen, mendapatkan 51 kursi. PPP dengan 11.329.905 suara atau 10,71 persen, mendapatkan 58 kursi atau kehilangan 31 kursi dibanding Pemilu 1997. PAN meraih 7.528.956 suara atau 7,12 persen, mendapatkan 34 kursi.²

Pemilu 2004, diselenggarakan dengan harapan masih adanya angin segar untuk perubahan nasib rakyat melalui pemilu kali ini. 24 Partai politik yang bertarung di pemilu 2004, masih dikuasai oleh kekuatan politik lama yang terus bertengger dan tentu saja semakin melanggengkan *status quo*, yang artinya jauh dari harapan perubahan. Banyak masyarakat yang melirik dengan pesimis pemilu 2009 akan membawa perubahan mendasar bagi rakyat, walaupun datang ke tempat pencoblosan lebih banyak karena tradisi kultural yang menempatkan pemilihan umum sebagai kewajiban bagi pemilih kultural karena bagaimanapun pemilu 2004 tidak terlepas dari manifestasi atas pertarungan kelompok nasionalis dan religius dalam hal ini Islam.

Hasilnya, PDI Perjuangan mengalami kemerosotan karena dinilai partai yang menang pada tahun 1999 ini ternyata kebijakannya malah jauh dari "wong cilik". Dalam pemilu 2004 ini, justru Golkar yang kembali memenangkan pertarungan politik ini setelah mengambil berbagai terobosan didalam proses demokrasi di internal partainya melalui mekanisme konvensi yang mampu menarik perhatian pemilih sembari berharap reformasi ini akan dilanjutkan dengan perubahan nasib rakyat. Disusul Partai Keadilan Sejahtera yang mampu menyodok mengumpulkan pundi suara yang besar, misalnya untuk pemilihan di DKI Jakarta, PKS yang sebelumnya bernama Partai Keadilan ini mendulang suara terbanyak di DKI Jakarta.

Meskipun demikian, belajar dari pemilu 1999 dan 2004 bahwa partai politik pemenang pemilu tidak selalu diikuti dengan kemenangan pada kandidat Presiden yang diusung oleh partai tersebut. Meskipun menang pada tahun 1999, yang terpilih sebagai Presiden adalah Gus Dur dari PKB dan pemilu 2004 yang terpilih sebagai Presiden adalah SBY dari Partai Demokrat. Budaya patron yang mengkultuskan tokoh, ternyata

² Situs resmi KPU - www.kpu.go.id

begitu kuat melandasi pilihan politik pemilih di Indonesia. Tidak heran jika saat ini, berbagai iklan elit politik berlalu lalang di media massa dalam rangka membangun figur dan citranya kepada masyarakat.

Hasil pemilu 2004 telah dirasakan bersama oleh rakyat Indonesia, berbagai peristiwa dan kondisi krisis ekonomi dan lingkungan semakin melingkupi kita pada sebuah kesimpulan bahwa rakyat kembali ditinggalkan oleh elit politik setelah mendapatkan kekuasaan. Ini diperkuat dengan data yang dipaparkan oleh Kompas terkait dengan penilaian pemilih terhadap partai politik yang bertarung di pemilu 2004 dan khususnya yang berkuasa. Menurut litbang Kompas, 84,7 persen responden menyatakan kecewa dengan kinerja partai politik yang bertarung dalam pemilu 2004. meskipun demikian, kondisi tersebut tidak mempengaruhi banyak konstelasi politik tetap terjadi, dan dilakukan oleh partai politik menjelang pemilu 2009 yang salah satunya dapat diukur dari berbagai iklan politik di media massa baik yang menampilkan profil partainya maupun figur partai yang akan didorong sebagai Capres maupun Cawapres.

Walaupun masih bisa diperdebatkan, hasil polling terkait dengan partai terbaik di Indonesia berikut ini, menggambarkan bahwa ditengah apatisnya masyarakat terhadap perubahan nasib mereka melalui pemilu, "pesta" ini tetap dilihat sebagai sebuah peluang pragmatis.

Dari hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa 7 partai politik dinilai baik saat ini merupakan partai politik yang sebelumnya telah memiliki "suara" baik di parlemen maupun pemerintahan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah ada jaminan perubahan mendasar bagi bangsa ini yang dilalui dalam sebuah proses demokrasi prosedural yang bernama pemilu 2009 dan pemilihan kepala daerah?

Melihat dari paket Undang-Undang Politik yang dikeluarkan antara lain Undang-Undang tentang Partai Politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hanya ketentuan terkait dengan langkah afirmatif action melalui quota minimum 30% keterwakilan perempuan di politik yang dinilai progressif, meskipun akhirnya dimentahkan kembali oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang anggota legislatif ditentukan oleh suara terbanyak, bukan lagi berdasarkan nomor urut partai yang semakin menegaskan langkah afirmatif action tersebut. Selebihnya, paket Undang-

Undang politik ini hanya semakin memperkuat partai politik dominan didalam kerajaan yang bernama kekuasaan baik di parlemen maupun pemerintahan.

Selain melihat pada paket Undang-Undang politiknya yang melandasi pelaksanaan pemilu 2009, Sarekat Hijau Indonesia³ mencoba memberikan sebuah penilaian atas pemilu 2009 kepada aktor-aktor politiknya dalam hal ini partai politik yang maju dalam gelanggang electoral prosedural, yang sesungguhnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun demokratisasi di Indonesia. Ada basis penilaian yang coba kami lihat sejauhmana relevansi pemilu 2009 terhadap berbagai krisis yang dialami oleh rakyat, yakni (1) demokrasi kerakyatan, (2) keadilan sosial, (3) kemandirian ekonomi dan (4) keberlanjutan lingkungan hidup.

Dari empat nilai ini, kebanyakan partai politik menuliskan hal yang sama didalam dokumen organisasi mereka yakni bagaimana mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, berdaulat. Namun jangan bergembira dulu, karena belajar dari pengalaman pemilu 2004, berdasarkan riset dari Indo Barometer menyebutkan bahwa mayoritas pemilih menganggap bahwa kebijakan partai baik terkait dengan ekonomi, politik, sosial dan budaya itu hampir sama.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Biro Politik dan Ekonomi Sarekat Hijau Indonesia terhadap dokumen organisasi dan pengalaman kerja partai politik khususnya terkait dengan sejumlah produk perundang-undangan yang dikeluarkan dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, kami melihat semakin kuatnya pemilu 2009 sebagai media transaksi politik, dibandingkan dengan proses pendidikan politik itu sendiri bagi rakyat.

Paket Kebijakan Kreatif-Destruktif

Setidaknya, paket kebijakan ekonomi pemerintah 2008-2009 yang tertuang dalam Inpres Nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009 memuat berbagai kebijakan ekonomi yang dapat dikelompokkan ke dalam 8 bidang, yaitu kebijakan perbaikan iklim investasi, kebijakan ekonomi makro dan keuangan,

³ Sarekat Hijau Indonesia (SHI) adalah organisasi kemasyarakatan yang berbasis massa pada tanggal 6 Juli 2007 dan dideklarasikan di Jakarta oleh aktivis dan perwakilan organisasi dari 21 provinsi di Indonesia dengan latar belakang profesi dan aktivitas, antara lain: aktivis organisasi non pemerintah, mahasiswa, seniman, kader-kader SHI, akademisi dan pimpinan organisasi rakyat. Gerakan bersama ini akan menjadi Partai Politik alternatif yang di dukung rakyat untuk melakukan perubahan sosial dan pembaruan ekonomi politik di Indonesia, untuk kemakmuran dan keadilan rakyat, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.

kebijakan ketahanan energi, dan kebijakan sumber daya alam, lingkungan dan pertanian.

Menjadi menarik untuk dilihat bahwa program ekonomi 2008-2009 sesungguhnya menempatkan berbagai krisis yang dihadapi Indonesia khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan pertanian difokuskan untuk dilakukan oleh pemerintah. Namun faktanya, implementasi atas program ekonomi tersebut justru melanggengkan kemiskinan karena menjauhkan akses dan kontrol rakyat terhadap sumberdaya alamnya, melanggengkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak ekonomi, sosial dan budaya, serta mengabaikan keberlanjutan layanan alam.

Krisis pangan baik ditingkat global, nasional dan global menjadi perhatian banyak kalangan termasuk pengurus negara. Sayangnya krisis pangan ini tidak dipahami akar masalahnya, sehingga kebijakan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah justru semakin menjauhkan akses dan kontrol rakyat terhadap pangan seperti kebijakan impor beras. Krisis pangan di Indonesia disebabkan oleh liberalisasi di sektor pertanian yang memaksa petani menjadi tergantung terhadap benih, bibit, dan pupuk-pestisida, serta pengelolaan model agribisnis yang lebih percaya kepada investor dari pada kemampuan petani kecil dan menyebabkan ketergantungan petani terhadap industri pertanian.

Krisis pangan juga disebabkan oleh penguasaan lahan yang timpang, dimana lahan pertanian dikonversi untuk perkebunan skala besar, industri kehutanan, dan industri pertambangan, yang menimbulkan konflik agraria yang semakin memperpanjang potret buram sektor pertanian di Indonesia. Pembaruan agraria yang dijanjikan oleh Pemerintah SBY-JK pada tahun 2006 melalui program pembaruan agraria nasional berupa distribusi tanah kepada petani hanya menjadi janji palsu. Hasilnya, petani di Indonesia tidak beranjak dari titik kemiskinannya sebagaimana survey yang dilakukan oleh Serikat Petani Indonesia (SPI) terhadap keluarga petani yakni pendapatan harian petani hanya Rp. 4.300 setiap keluarga.

Krisis air semakin memperpanjang derita petani dan masyarakat miskin lainnya dengan semakin hilangnya sumber-sumber air akibat kerusakan lingkungan, tidak kurang dari 64 DAS mengalami kerusakan. Kondisi ini semakin diperkuat dengan agenda privatisasi dan komersialisasi air yang dilegalkan melalui undang-undang sumber daya air dan

perubahan iklim. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat dari 65% penduduk Indonesia yang tinggal di Jawa, harus memperebutkan air yang hanya tersedia 4,5 persen dari ketersediaan air di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan permukiman, pertanian dan industri. Dari ketiga sektor yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap ketersediaan air, bagi pemerintah yang paling mungkin dikorbankan adalah sektor pertanian.

Kebijakan energi hijau, sebagai respon terhadap isu perubahan iklim akibat pemanasan global, menempatkan energi yang berasal dari agrofuel sebagai alternatif utama, akan mendorong semakin meningkatnya pemenuhan bahan bakar nabati untuk negara-negara industri, yang mengakibatkan terjadinya perluasan perkebunan skala besar untuk menghasilkan bahan baku energi hijau. Kebijakan investasi global pun lebih diarahkan pada pengembangan industri penghasil agrofuel. Negara-negara selatan, termasuk Indonesia, menjadi sasaran utama pengembangan perkebunan skala besar penghasil bahan baku energi nabati. Hamparan perkebunan besar kelapa sawit, kedelai maupun tebu, semakin mudah ditemui di negara-negara selatan, yang selalu diikuti dengan terjadinya peminggiran komunitas lokal, pengrusakan lingkungan hidup dan pelanggaran hak asasi manusia.

Isu perubahan iklim juga direspon dengan keinginan untuk melakukan upaya adaptasi dan mitigasi, yang kemudian mendorong terjadinya "perlombaan" perdagangan karbon sebagai market based dan sumber uang, yang diikuti oleh mekanisme pemberian utang kepada negara-negara pemilik hutan. Indonesia telah menyetujui utang luar negeri baru untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dari Jepang dan Perancis dengan nilai Rp 550 triliun. Di sisi lain, perdagangan karbon melalui skema Reducing Emissions from avoid Deforestation and Degradation (REDD) yang dipersiapkan oleh Pemerintah, menjadikan kawasan hutan terkapling dan menyebabkan hilangnya akses dan kontrol rakyat terhadap kawasan hutan yang karbonnya diperdagangkan.

Kedaulatan energi tidak akan terjadi, selama pemerintah belum menyadari bahwa kedaulatan energi tidak akan terwujud jika negara masih berada dalam genggaman pasar minyak dunia. Energi kita juga tetap dikendalikan oleh pasar, dan menempatkan sumber energi seperti batubara sebagai komoditas untuk kepentingan pemenuhan konsumsi negara-negara industri. Sedari awal, gerakan politik hijau di Indonesia menyatakan bahwa krisis energi bukan semata soal harga. Karena meskipun

pemerintah menurunkan bahan bakar minyak berupa premium, pemerintah tetap tidak memiliki proteksi atas naik turunnya harga minyak, yang lebih ditentukan oleh pasar.

Krisis energi, khususnya menipisnya bahan bakar fosil juga akan digunakan oleh pemerintah untuk memuluskan kampanye pengembangan energi nuklir sebagai sebuah jawaban atas krisis energi. Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) semakin tumbuh pada hampir seluruh pulau di Indonesia, dengan dalih untuk menutupi kekurangan energi listrik nasional, justru menyimpan sumber bencana baru bagi rakyat. Nuklir jelas bukan jawaban bagi persoalan energi Indonesia. Sebaliknya, nuklir justru merupakan ancaman baru dalam membangun kedaulatan energi. Indonesia akan semakin mengalami ketergantungan dengan lingkaran kapitalisme global dimana teknologi, sumber pembiayaan (utang luar negeri) dan bahan baku energi sepenuhnya dikendalikan oleh pihak asing.

Krisis ekonomi global telah diprediksikan akan terus terjadi dan tahun 2009 ini, Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa sistem ekonomi kapitalisme meskipun telah gagal, masih ditempatkan sebagai pilihan bagi pondasi pembangunan dibidang ekonomi Indonesia. Akumulasi keuntungan sebesar mungkin dengan biaya semurah mungkin (bahan baku, tenaga kerja murah, modal keuangan, biaya pengelolaan limbah/lingkungan hidup), dan bertumpu pada produksi kotor antara lain industri ekstraktif dengan mengabaikan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat dan layanan alam.

Tahun 2009, akhirnya menjadi sebuah pertarungan baru bagi elit oligarki politik untuk semakin kreatif. Sayangnya, kreatifitas tersebut bukan bertujuan untuk kebaikan bagi rakyat dan lingkungan, tetapi justru kreatifitas yang menghancurkan keberlanjutan sumber-sumber kehidupan rakyat.

Lingkungan Hidup, Bukan Ideologi Partai

Partai politik mengatakan bahwa wacana lingkungan sudah masuk dalam agenda partai politik, setidaknya itu terkuak dalam penyampaian visi misi lingkungan Partai Bulan Bintang yang bertarung dalam pemilu 2009 ini dalam satu acara di stasiun televisi, dimana Ketua DPP nya saat itu tidak bisa membedakan mana visi misi lingkungan partai dengan aktifitas, sehingga dia mengatakan visi lingkungan partainya adalah

mendirikan LSM lingkungan. Kondisi ini menunjukkan betapa sempitnya kader partai memahami makna lingkungan hidup itu sendiri.

Masyarakat menilai agenda lingkungan hidup masih jauh dari agenda partai bila menggunakan dokumen organisasi partai sebagai alat ukurnya. Ketika menilai agenda hijau dalam pesta demokrasi, tidak bisa hanya melihat kata-kata lingkungan hidup yang ada didalam dokumen organisasi partai politik baik didalam visi misi, AD-ART, manifesto, platform, program maupun bidang kerja partai politik. Bahwa bicara soal lingkungan tidak sesederhana bicara soal pembangunan berkelanjutan.

Soal lingkungan (baca: environmentalisme) adalah soal ideologi, soal sebuah arah gerakan yang akan mengantarkan kita pada sebuah pilihan sikap untuk menentukan perubahan masa depan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Bahkan, dia bukan satu hal yang berdiri sendiri dan seolah-olah tidak ada relasinya dengan tatanan ekonomi politik global, nasional dan lokal. Padahal pilihan ekonomi politik yang memiliki karakter yang eksploitatif, menjadi penyebab utama dari kerusakan lingkungan hidup dan penghancuran sumber-sumber kehidupan masyarakat untuk pemenuhan konsumsi bagi segelintir orang.

Pemilu 2009, Absen Agenda "Hijau"

Pemilu langsung 2009 sebagai salah satu bentuk demokrasi prosedural, memang bisa terwujud. Demokrasi melalui pemilu dapat menjadi pintu besar untuk memasuki ruang-ruang kuasa, bukan hanya kepada elit, tetapi juga kepada masyarakat sipil. Demokrasi yang terpusat pada pemilihan umum (*electoral democracy*), tidak lebih hanya sebagai sebuah kemenangan dari politik prosedural, dan hanya memberi kesempatan kepada kekuatan neoliberal dan predatoris untuk bergantian menguasai lembaga-lembaga negara.

Kekuatan korporatokrasi telah mampu mempengaruhi agenda-agenda politik mulai dari tingkatan Pilkada hingga Pemilu Legislatif dan Pilpres. Caranya melalui dukungan finansial pada kandidat-kandidat yang bertarung pada pesta demokrasi, janji-janji politik yang disampaikan tidak lebih hanya untuk semakin melanggengkan dominasi agenda neoliberal. Harapan pembaruan terhadap Pemilu 2009 masih berupa mimpi, kenyataannya proses yang akan terjadi masih hampir sama dengan Pemilu 2004.

Bahwa oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai politik yang ada hari ini. Kepentingannya tunggal yakni mempertahankan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk memperebutkan rente ekonomi dari penggadaian kekayaan alam negeri ini. Kalau pun ada penentangan dan sikap yang seolah-olah oposisi sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi.

Sarekat Hijau Indonesia memandang bahwa secara substansi pemilu 2009 masih belum beranjak maju untuk mencapai sebuah cita-cita besar bagi perwujudan demokrasi kerakyatan, keadilan sosial, kedaulatan dan kemandirian ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Ini dapat dicermati dari diabaikannya agenda "hijau" sebagai sebuah agenda utama dalam kebijakan partai-partai politik baik dalam visi misinya, platform maupun program partai. Agenda hijau tentu bukan hanya melihat lingkungan hidup sebagai sebuah wacana, melainkan juga sebagai sebuah ideologi yang menjadi arah gerak dari sebuah perubahan yang mendasar atas tatanan ekonomi Indonesia dan global yang kental bercorak kapitalistik.

Jika dilihat dalam dokumen organisasi yang bisa dibuka dalam berbagai media komunikasi partai politik, paling tidak partai-partai politik yang sudah duduk di parlemen saat ini antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Bintang Reformasi sudah memaparkan agenda lingkungannya atau PDIP yang secara khusus memiliki bidang lingkungan hidup dalam kepengurusannya dan perencanaan strategisnya. Seperti yang tertuang dalam agenda lingkungan salah satu partai berikut ini; "Melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan di segala bidang dengan memperhatikan lingkungan hidup".

Sayangnya, melihat kondisi kualitas lingkungan hidup yang semakin buruk, ditambah dengan bencana ekologis yang terus berlanjut, dokumen organisasi partai tidaklah cukup, tetapi juga perubahan mendasar atas tatanan ekonomi politik yang akan dipilih kedepannya. Untuk yang satu ini, Sarekat Hijau Indonesia menilai tidak ada partai yang berani menawarkan agenda perubahan mendasar, dengan merombak tata kuasa yang diturunkan pada sebuah nilai demokrasi kerakyatan, tata kelola untuk menjamin kedaulatan, tata produksi dan tata konsumsi yang dapat memastikan terwujudnya keberlanjutan lingkungan hidup. Pengalaman pemilu 2004, akan membantu kita menilai agenda perubahan ini.

Soal lingkungan adalah soal ideologi, soal sebuah arah gerakan yang akan mengantarkan kita pada sebuah pilihan sikap untuk menentukan masa depan. Tidak cukup hanya melihat dokumen organisasi sebagai sebuah basis argumentasi untuk memilih, karena jika lingkungan hidup dimaknai sebagai sebuah ideologi, maka seharusnya partai-partai yang sudah menempatkan lingkungan hidup sebagai agenda partainya, juga menurulkannya pada tahapan tindakan politik yang tertuang dalam berbagai produk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang berkuasa.

Partai-partai diatas yang mencantumkan secara jelas isu lingkungan hidup dan soal-soal rakyat lainnya, itupun tetap tidak berpengaruh dengan kebijakan yang dihasilkan. Dari produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Parlemen, terlihat bahwa tidak ada relasi antara visi misi dan platform partai politik, dengan kebijakan yang dikeluarkan sebagai pengambil keputusan politik negeri ini, seperti yang tertera dalam tabel berikut ini yang diolah dari berbagai sumber.

	Undang-Undang/ Kebijakan	Posisi Partai								
		Golkar	PDI-P	P. Demokrat	PKS	PPP	PKB	PBB	PBR	PAN
1.	Perpu 1/2004: Tambang di hutan lindung. Perpu ini mengizinkan tambang mengeksploitasi di kawasan hutan lindung		Mendukung			Mendukung	Menolak	Menolak		
2.	UU 7/2004 tentang Sumberdaya Air. Undang-undang ini melegalkan privatisasi air, air tidak lagi bisa diakses secara gratis oleh rakyat untuk kebutuhan dasarnya.	Mendukung	Mendukung		Meminta penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan	Mendukung	Abstain	Mendukung		Meminta penundaan sampai batas waktu yang tidak ditentukan
3.	UU 27/2007 Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Undang-undang ini membuka ruang bagi investor di sektor kelautan dan perikanan, dan menyingkirkan wilayah kelola	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung

	rakyat dan petambak tradisional									
4.	UU No. 25/2007 tentang Penanaman modal. Undang-undang ini memberikan waktu konsesi yang sangat lama kepada investor melalui HGU	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung
5.	UU Minerba. Undang-undang ini melegalkan pelanggaran HAM terhadap masyarakat yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung terhadap industri pertambangan.	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a):peralihan	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a): peralihan	Mendukung	Mendukung	Menolak Pasal 169 (a):peralihan
6.	UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang ini menyediakan penataan ruang untuk kepentingan pemodal, bukan kepentingan rakyat	Mendukung		Mendukung				Mendukung	Mendukung	Mendukung
7.	Kenaikan BBM 2005. Kebijakan kenaikan BBM disebabkan tidak adanya proteksi negara terhadap pasar minyak internasional, dan kebijakan kenaikan BBM menyebabkan rakyat semakin miskin karena kenaikan BBM dipastikan selalu diikuti dengan kenaikan harga lainnya.	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung	Mendukung				Mendukung
8.	Kenaikan BBM 2008	Mendukung	Menolak	Mendukung	Mendukung	Mendukung		Mendukung	Mendukung	Mendukung
9.	Kebijakan Utang Luar Negeri. Utang luar negeri membebani APBN untuk pembayaran utang haram, dan memangkas		Tahun 2009, menolak penambahan utang luar negeri dalam APBN			Renegosiasi			Menolak pembayaran utang haram pada tahun 2004	Menolak utang baru untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh tahun 2005

	anggaran dasar bagi rakyat. Utang luar negeri juga menjadi jalan bagi sistem ekonomi global untuk menjadikan Indonesia mengalami krisis kedaulatan								
10.	Lain-lain		Melepas LNG Tangguh dengan harga murah dibawah rezim Megawati						

Jika partai-partai yang sudah mencantumkan agenda lingkungan dalam dokumen organisasinya saja masih menjadi aktor-aktor yang memimpin kerusakan lingkungan hidup, apalagi partai politik yang didalam dokumen organisasinya tidak mencantumkan sama sekali agenda hijau seperti Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat yang selama satu periode ini menjadi penguasa, atau Partai Kebangkitan Bangsa yang pada tahun 2007 telah mendeklarasikan dirinya sebagai "partai hijau". Maka tidaklah mengherankan jika Partai Demokrat mengusung nuklir sebagai energi alternatif, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendorong biofuel untuk pemenuhan energi paska energi fosil.

Lalu bagaimana dengan partai politik baru belum sempat berkuasa, sudah mencantumkan dokumen isu lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam seperti Partai Persatuan Daerah, Partai Buruh, Partai Perjuangan Indonesia Baru, Partai Hanura dan Partai Gerindra cukup fenomenal dengan iklan-iklan politik yang cukup populis. Tidak ada indikator pengalaman dalam hal kebijakan untuk menilai ini, yang pasti mereka belum teruji. Namun kita bisa memiliki indikator yang lain dengan merekam jejak sejauhmana peran tokoh politiknya berkecimpung di industri ekstraktif yang ini telah menyebabkan krisis ekologis dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Menilai Caleg, Capres dan Cawapres

Selain melihat partai politik dan calon legislatif yang akan duduk di DPR/DPD maupun DPRD Kabupaten/Kota, bursa yang cukup ramai dikampanyekan melalui kebijakan

partai politiknya, kita juga menilai Capres dan Cawapres yang sudah berlalu lalang dengan iklan politik dengan berbagai janji perubahan yang disampaikan.

Dari nama-nama yang muncul di permukaan, selain kita mengukurnya pada kebijakan partai politiknya, kita juga dapat menilai dari seberapa besar imperium bisnis Capres dan Cawapres dalam industri ekstraktif yang menyumbang besar terhadap kerusakan lingkungan dan kejahatan kemanusiaan antara lain di industri pertambangan seperti minyak, gas dan batubara di Jawa Timur, industri kehutanan yang melakukan ekspansi di Kalimantan Timur dan Papua, Capres yang menguasai tanah yang begitu luas untuk bisnis mall dan bisnis di bidang properti di perkotaan seperti Jakarta dan Yogyakarta, dan industri perkebunan di Sumatera Utara.

Semua bisnis-bisnis ini di sektor sumber daya alam ini diduga kuat akan menjadi penyanggah utama dari ongkos politik yang dikeluarkan oleh para kandidat Presiden dan Wakil Presiden tentu saja dengan mengabaikan keberlanjutan lingkungannya, terlebih selama ini negeri ini tidak mengharamkan pejabat politik berbisnis guna mengurangi bentuk. Mungkin nama-nama Capres atau Cawapres ini tidak secara langsung memegang jabatan dalam perusahaan, yang juga mesti dilihat adalah keterikatan keluarga dan kroni-kroni penyokongnya didalam bisnis tersebut yang menyokong sumber pendanaan politiknya. Pastinya, ongkos politik tersebut bukan barang yang "gratisan", melainkan akan dihitung sebagai modal yang harus kembali dan bahkan dengan hitungan keuntungan yang akan didapatkan untuk melanggengkan kerajaan bisnis dan politiknya.

Pemilu 2009, "Pesta" Korporatokrasi

Belajar dari pengalaman membangun demokrasi melalui pemilu, waktu 2 (dua) periode terakhir ini, konon di sebut sebagai fakta keberhasilan pelaksanaan politik demokrasi prosedural, saya menilai bahwa rezim kekuasaan hari ini berada di dalam kebangkrutan karena menjadi sumber ancaman keselamatan rakyat dan menanamkan benih kehancuran negeri ini, namun disisi lain oligarki politik ini masih memiliki kekuatan hegemonik yang dominan.

Oligarki politik hari ini bercokol di hampir semua partai politik yang ada. Kepentingan tunggal dari semua sekanario politiknya, yakni mempertahankan kekuasaan dan share/pembagian sekaligus persaingan kalangan sendiri untuk memperebutkan rente

ekonomi dari “menjual” kekayaan alam negeri ini. Kalau pun ada penentangan dan sikap yang seolah-olah opisi sesungguhnya hanya permainan politik dan sirkulasi elit atau oligarki politik-ekonomi.

Sumber daya alam ditempatkan tidak lebih hanya sebagai sebuah komoditas, yang bisa dikeruk habis guna memenuhi tingkat konsumsi bagi negara-negara maju, dan menghancurkan secara sistematis dan struktural produktifitas yang disebabkan oleh penguasaan akses dan kontrol atas tanah dan alat-alat produksi yang lain, dan menghancurkan pengetahuan lokal yang mengatur regulasi wilayah dan tata kehidupan masyarakat itu sendiri. Semua modal sosial yang ada dalam tatanan masyarakat, diruntuhkan oleh mesin-mesin kapitalisme yang bekerja secara baik dan didukung penuh oleh kekuatan politik.

Pemilu 2009 ini tidak lebih hanya sebagai agenda untuk mengukuhkan rente ekonomi dan kekuatan elit politik yang dengan kolaborasi ini akan menghasilkan praktek liberalisasi di bidang ekonomi, dan konservatif dibidang politik. Agenda “hijau” pun semakin jauh dari harapan, dan demokrasi yang terpusat di Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilu 2009 hanya sebagai sarana bagi sebuah “pesta” rezim korporatokrasi⁴.

Jika demikian, sesungguhnya pemilu 2009 menjadi semakin tidak relevan untuk menjawab berbagai krisis yang dialami oleh rakyat. Kita bisa melihat bagaimana peristiwa krisis yang dialami oleh rakyat seperti lumpur Lapindo, banjir dan berbagai potret krisis ini tidak terhubung dengan kampanye politik partai.

Bila partai-partai politik ini tidak juga membuka pintu dan bermain api dengan memanipulasi agenda-agenda rakyat maka pilihan kemudian adalah deligitimasi total terhadap pemilu 2009 melalui langkah-langkah golput hingga boikot pemilu. Ujian utamanya bagi aktivis-aktivis progressif yang memiliki agenda perubahan di partai-partai politik sejauh mana mereka melakukan perubahan radikal dengan menempatkan imperialisme dan feodalisme sebagai musuh bersama. Walaupun berbagai indikasi yang kami amati, tidak ada harapan terjadi perubahan radikal dari partai-partai politik saat ini, artinya tindakan radikal nampaknya menjadi pilihan yang masuk akal.

⁴ Korporatokrasi; untuk menggambarkan penggabungan kekuatan finansial (korporasi, lembaga keuangan internasional) dan kekuatan politik untuk kepentingan penguasaan ekonomi dan politik

Karenanya, Sarekat Hijau Indonesia mendorong untuk membangun kekuatan politik alternatif rakyat, tugas utamanya adalah mendesak diadopsi agenda-agenda rakyat untuk melawan bercokolnya kekuatan-kekuatan imperialis dan feodal di dalam tubuh kekuasaan. Serta meletakkan landasan bagi model ekonomi-politik pada tata kuasa, tata kelola, tata produksi dan tata konsumsi sumber-sumber kehidupan bukan hanya dalam level negara, melainkan harus mampu diturunkan oleh kekuatan komunitas lokal yang berorientasi kepada kemandirian ekonomi, keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.

Sarekat Hijau Indonesia juga meyakini bahwa demokrasi politik yang diterjemahkan dalam kotak suara pemilu tidak membawa manfaat bagi rakyat, jika tidak diikuti dengan ekonomi kerakyatan yakni dengan menyerahkan alat-alat produksi ke tangan rakyat sebagaimana yang dimandatkan dalam konstitusi negara.